

OPOSISI POLITIK DALAM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN ABU YA'LA AL-FARRA' DAN IBNU TAIMIYAH)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

H A R I S
9636 2724

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. DRS. A. RIZAL QASIM, M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Islam memberikan kebebasan kepada ummatnya untuk melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan demi tercapainya system pemerintahan yang berkeadilan serta menghargai Hak-hak Asasi Manusia. Istilah yang berkembang dalam system politik modern untuk menerjemahkan semangat ide dari hasrat di atas dikenal dengan istilah oposisi. Di antara sebagian pemikir politik Islam seperti al-Mawardi, at-Taftazani, al-Gazali, Ibnu taimiyah, Abu Ya'la al-Farra' dan lainnya menegaskan bahwa oposisi politik adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari system politik Islam. Dari sekian tokoh yang menarik untuk diapresiasi, khususnya gagasan tentang oposisi adalah Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah. Hal ini mengingat keduanya tokoh mazhab yang sama yaitu Hambali, dan mempunyai latar belakang yang sangat berbeda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), bersifat deskriptif komparatif dengan menggunakan pendekatan histories sosiologis. Dari data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif.

Pandangan Abu Ya'la al-Farra'', gerakan oposisi partisipatif yang berbentuk kerjasama dan control kepada pemerintah boleh dilakukan. Demikian juga Ibnu taimiyah mempunyai pandangan yang sama tentang gerakan oposisi partisipasif ini. Sedang dalam konteks oposisi revolusioner keduanya memiliki pemikiran yang berbeda. Al-Farra' lebih cenderung mengatakan bahwa gerakan oposisi revolusioner terhadap pemerintah tidak dapat dibenarkan sama sekali, baik yang sifatnya hanya membangun suatu aliran mazhab baru atau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa melakukan oposisi revolusioner terhadap pemerintah dapat dibenarkan apabila seorang pemimpin sudah melenceng dan keluar dari ajaran Islam.

Key word: oposisi, politik Islam, Abu Ya'la al-Farra', Ibnu Taimiyah

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Haris
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

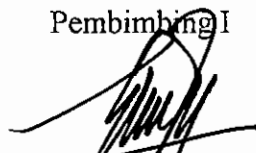
Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Haris yang berjudul "**OPOSISI POLITIK DALAM ISLAM**" (*Studi Atas Pemikiran Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah*), maka selaku pembimbing I, kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Selanjutnya skripsi tersebut dapat segera diujikan di depan sidang munaqasyah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2001 M.
29 Ramadhan 1422 H.

Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

DRS. A. RIZAL QASIM, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Haris
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Haris yang berjudul **"OPOSISI POLITIK DALAM ISLAM"** (*Studi Atas Pemikiran Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah*), maka selaku pembimbing II, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Selanjutnya skripsi tersebut dapat segera diujikan didepan sidang munaqasyah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2001M.
29 Ramadhan 1422 H.

Pembimbing II



Drs. A. Rizal Qasim, M.Si
NIP. 150 256 649

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

OPOSISI POLITIK DALAM ISLAM

(STUDI ATAS PEMIKIRAN ABU YA'LA AL-FARRA' DAN IBNU TAIMIYAH)

yang disusun oleh

HARIS

NIM. 96362724

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
pada tanggal 9 Januari 2002
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta, 1 April 2002

DEKAN



FAKULTAS SYARIAH
SUNAN KALIJAGA

DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zen, M.A
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP. 150 253 887

Pembimbing I

DR. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Pembimbing II

Drs. A. Rizal Qasim, M.Si
NIP. 150 256 649

Penguji I

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Penguji II

Drs. A. Rizal Qasim, M.Si
NIP. 150 256 649

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini:

Bagi jiwa penyulut obor perjuangan; H.Ali Imran

Bagi kalbu penyibak tirai qanaah; Hj.Maftuhah

Bagi jiwa dermaga rindu tercurah; Misriyatul Hasanah

Bagi samudra pelayaran cinta; Keluarga

Bagi pendar cahaya mulia; Nuril Mala

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له,
واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين .

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT, atas semua rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberkahi penyusun, sehingga penulisan skripsi ini bisa rampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari kegelapan menuju kehidupan Islami yang penuh kedamaian.

Selanjutnya penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami haturkan kepada:

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan selama menempuh studi.
3. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA serta Drs. A. Rizal Qasim, Msi selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak koreksi, bimbingan dan arahan demi perbaikan skripsi ini.
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Drs. Muhyiddin, selaku Penasehat Akademik
6. Seluruh jajaran civitas akademika di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Selain dari mereka yang tertera namanya di atas, penulis patut mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guruku yang telah membimbingku sejak sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

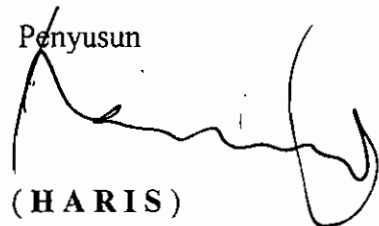
Demikian juga penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idham Samawi (Bupati Kab.Bantul) yang telah memberikan sumbangannya baik yang bersifat moril atau materiil sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan lancar. Tak lupa penyusun menyampaikan salam perjuangan buat teman-teman, diantaranya Ilan, Fatur, Abduh, Yusuf, bang Yaqin dsb, (terima kasih komputer dan motivasinya), juga untuk komunitas "Annuqayah" dan Masjid Agung Syuhada' yang telah mengantarkan kepada realitas hidup yang sesungguhnya.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat berdoa semoga segala kebaikan yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal dan bernilai ibadah disisi-Nya. Amien.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan mungkin juga terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan masukan dari para pemerhati politik Islam. Mudah-mudahan karya sederhana ini bermanfaat. Semoga !

Yogyakarta, 4 Desember 2001 M.
18 Ramadhan 1422 H.

Penyusun



(HARIS)

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	ze! (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>ji-zyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-litr</i>
------------	---------	----------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB II SELAYANG PANDANG OPOSISI POLITIK ISLAM	 15
A. Pengertian	15
B. Sejarah Munculnya Oposisi.....	16
C. Jaminan dan Landasan Normatif Beroposisi.....	35

BAB III RIWAYAT HIDUP ABU YA'LA AL-FARRA'	
DAN IBNU TAIMIYAH	39
A. ABU YA'LA AL-FARRA'	
1. Biografi Dan Karya-karyanya.....	39
2. Kondisi Sosial Politik	42
3. Pemikiran Al-Farra' Tentang Politik Islam	45
B. IBNU TAIMIYAH	
1. Biografi Dan Karya-karyanya.....	50
2. Kondisi Sosial Politik	52
3. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik Islam	54
 BAB IV KOMPARASI PEMIKIRAN ABU YA'LA AL-FARRA'	
DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG OPOSISI POLITIK	
DALAM ISLAM.....	60
A. Pemikiran Abu Ya'la al-Farra' Tentang Oposisi	60
B. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Oposisi.....	64
C. Sisi Persamaan	68
D. Sisi Perbedaan	69
E. Oposisi Sebagai Media Kontrol Terhadap Pemerintah.....	71
F. Implikasi Pemikiran Abu Ya'la al-Farra' Dan Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Politik Islam	73
 BABV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA'.....	II
CURICULUM VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu, Islam (baca: agama) datang membawa angin pencerahan terhadap kehidupan manusia. Banyak cendekiawan (ulama'), baik muslim ataupun non muslim menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh¹. Pengakuan tersebut menyeruak kepermukaan setelah melalui eksplorasi yang panjang terhadap al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad sebagai rujukan otentik dari Islam itu sendiri. Lebih lanjut kemudian ada yang mengatakan bahwa Islam adalah *ad-dīn wa ad-daulah* (agama dan negara), hal ini disebabkan karena dimensi yang diakomodasi Islam tidak hanya meliputi persoalan-persoalan *teologis transcendental* melainkan juga persoalan *sosial* dan *ketatanegaraan*.

Dalam konteks hubungan antara Islam dan ketatanegaraan di kalangan umat Islam hingga sekarang terdapat tiga aliran.

Aliran pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.

¹) John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim, Problem dan Prospek*, Cet.1, (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 2.

Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, dengan argumentasi bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai sebuah negara.

Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara².

Betapapun dengan beragamnya pandangan tentang relasi Islam dan negara yang jelas masyarakat politik (bernegara) telah dirintis sejak awal kerosulan Muhammad. Setelah beliau berhasil menegakkan kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam al-Qur'an secara bertahap mulai diwujudkan dalam kehidupan nyata. Langkah tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari para sahabat³. Pada tahap awal pemerintahannya Muhammad mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengikat baik bagi komunitas muslim

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet.5, (Jakarta: UI- Press, 1993) hlm.1-2.

³ Jabir Qumaihah, *Berposisi Menurut Islam*, Cet.3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.10.

maupun komunitas lainnya⁴. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa prinsip musyawarah sudah dijadikan sebagai metode atau cara untuk memutuskan suatu persoalan misalnya, pada penentuan posisi perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah⁵.

Dari hari ke hari dinamika politik terus bergulir dan meneraukan momentumnya pasca wafatnya rasulullah. Pada saat itulah sahabat disibukkan dengan persoalan siapa kira-kira yang layak dan pantas untuk melanjutkan perjuangan sebagai pengganti Muhammad. Hal ini disebabkan karena Muhammad tidak meninggalkan pesan atau wasiat tentang siapa yang harus menggantikan posisinya sebagai pimpinan umat.

Sejak itulah muncul beberapa problem politik atau pemerintahan yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa pada generasi pertama situasi dan kondisi pemerintahan dimasa sahabat tidak dijumpai banyak gejolak, karena setiap persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan semakin luasnya wilayah pemerintahannya dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan baru yang lebih realistik.

⁴) Maklumat diatas dikenal dengan piagam Madinah yang dijadikan sebagai undang-undang atau pijakan yang secara garis besar berisi tentang bagaimana satu komunitas bisa berinteraksi dengan baik kepada komunitasnya atau dengan komunitas lainnya sehingga bisa tercipta harmoni dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantudalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama, lihat *Islam dan Tata Negara*, hlm.15-16.

⁵) *Ibid.*, hlm. 17-18.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang diambil oleh Umar berkaitan dengan pembagian hasil rampasan perang. Ternyata kebijakan - kebijakan tersebut membawa dampak negatif bagi pemerintahannya. Hal tersebut terakumulasi ketika pemerintahan berada di tangan Usman bin Affan. Ada banyak gejolak dan protes dari sebagian besar ummat atas kebijakan yang diterapkannya. Sejak saat itulah muncul gejolak dan pertentangan dari sebagian ummat. Realitas politik menunjukkan bahwa perjalanan pemerintahan tidak selamanya linear seperti yang diharapkan, dengan kata lain hubungan antara pemerintah dan rakyat yang tidak setuju dengannya merupakan bagian baku dari setiap pengalaman politik umat Islam. Tidak ada pemerintahan yang didukung sepenuhnya dalam segala hal oleh rakyat yang diperintah⁶.

Islam memberikan kebebasan kepada ummatnya untuk melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan demi tercapainya sistem pemerintahan yang berkeadilan serta menghargai Hak-Hak Asasi Manusia⁷. Istilah yang berkembang dalam sistem politik modern untuk menerjemahkan semangat ide dari hasrat di atas dikenal dengan istilah 'oposisi'. Di antara sebagian pemikir politik Islam seperti Al-Mawardi, At-Taftazani, Al-Gazali, Ibnu Taimiyah, Abu Ya'la al-Farra' dan lainnya menegaskan bahwa oposisi politik adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem politik Islam⁸.

⁶) John. L. Esposito & John O. Voll, *Demokras...*, hlm. 41.

⁷) Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Cet.2, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 30-37.

⁸) M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.276.

Secara global mereka berpendapat bahwa ummat Islam diwajibkan untuk taat dan membantu atau mendukung kebijakannya selama pemimpin berpegang pada perintah Allah dan melaksanakan hak-hak rakyat yang meliputi; memimpin dengan dasar keadilan, melaksanakan hukum-hukum yang ada serta menjaga amanat kepemimpinannya⁹.

Walaupun demikian di antara pemikir-pemikir di atas mempunyai kekhasan dan cara pandang yang berbeda terhadap persoalan oposisi dalam politik Islam. Dalam hemat penyusun di antara sekian tokoh yang menarik untuk diapresiasi, khususnya gagasan tentang oposisi adalah Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah. Hal ini mengingat keduanya adalah tokoh dari mazhab yang sama yaitu Hambali, dan mempunyai latar belakang yang sangat berbeda. Abu Ya'la adalah seorang intelektual zahid-relegius sedangkan Ibnu Taimiyah adalah seorang Intelektual kritis dan pejuang yang gigih. Karena alasan-alasan itulah penelitian ini difokuskan kepada dua tokoh tersebut.

Sebagai ilustrasi awal, walaupun keduanya menganut mazhab yang sama ternyata dalam pemikirannya dijumpai beberapa persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar. Walaupun memang harus disadari bahwa keduanya adalah merupakan generasi yang berbeda dengan situasi dan kondisi yang berbeda pula.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm.276.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka focus kajian dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud oposisi politik Islam?
2. Bagaimana pemikiran Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah tentang oposisi politik Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Menguraikan serta menjelaskan secara teoritik dan normatif tentang maksud atau pengertian oposisi politik Islam
2. Mengungkap dan menjelaskan pemikiran Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah tentang oposisi politik Islam

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang oposisi politik Islam sebagai bagian penting dalam sistem politik Islam.
2. Mempertimbangkan secara kritis kontribusi pemikiran dari kedua tokoh di atas, serta untuk lebih meningkatkan apresiasi pemikiran tokoh-tokoh klasik sehingga bisa memperkaya khazanah keilmuan Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melacak dan menelaah tentang tulisan atau penelitian tentang tema yang sama belumlah dijumpai penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang oposisi menurut kedua tokoh diatas. Setidaknya ada beberapa tulisan yang berbicara tentang oposisi antara lain sebagai berikut:

Penelitian dalam bentuk skripsi ditulis oleh Wahyu Hidayat, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan stresing kajian pada persoalan oposisi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Islam memberikan tempat dan membolehkan bahkan mewajibkan untuk melakukan oposisi politik terhadap pemerintah. Walaupun penelitian tersebut meninjau dari perspektif hukum Islam akan tetapi tidak secara khusus mengkaji pemikiran tokoh atau ulama', sehingga penelitian ini menemukan signifikansinya.

Selanjutnya, buku Beroposisi menurut Islam yang diindonesiakan dari *al-Mu'aradat fi al-Islām baina an-Nazāriyyā wa at-Tatbiq* karya Jabir Qumaihah, disamping memuat landasan normatif dan teoritik dalam prespektif Islam, ia juga menjelaskan secara global bentuk dan pola oposisi serta pengalaman oposisi yang pernah ada dalam sejarah Islam, tanpa menyinggung sedikitpun pemikiran tentang oposisi politik yang ditelorkan baik oleh ulama' klasik, pertengahan dan modern. Ilustrasi dari buku tersebut setidaknya memperkaya data dari penelitian skripsi ini.

Sedangkan buku Teori politik Islam yang diindonesiakan dari *an-Nazariyah as-Siyāṣah al-Islāmiyah* karya M. Dhiauddin Rais lebih banyak berbicara tentang kerangka teoritik politik Islam dengan mengacu kepada struktur dan pengalaman yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad dan generasi sahabat.

Pada buku ini juga dibahas secara detail tentang ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pemerintahan dengan disertai analisis yang komprehensif dari berbagai aliran yang berkembang dalam Islam. Boleh dibilang apresiasi rais cukup sempurna membahas tentang politik Islam. Tak ketinggalan juga ia menyinggung tentang munculnya kaum oposisi dalam Islam. Menurutnya gerakan oposisi dalam Islam berkembang pasca pembaiatan kepada Yazid bin Mu'awiyah yang dilakukan dengan jalur wasiat tanpa musyawarah mufakat sebelumnya, sehingga muncullah kelompok-kelompok yang tidak setuju terhadap Yazid.

Buku dengan judul *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani (Isu-Isu Besar Politik Islam)* karya Fahmi Huwaydi mengungkap persoalan demokrasi dengan real politik Islam. Lebih dari itu ia menjabarkan hampir seluruh tema-tema besar persoalan politik Islam kontemporer. Persoalan oposisi yang dianggapnya sebagai salah satu alat kontrol dalam pemerintahan mendapat perhatian yang serius dalam karya tersebut. Ia menyebutkan bahwa wacana Islam memerintah dan mengajak kaum muslim untuk beroposisi, dengan kata lain ia menyebut perintah dan ajakan tersebut sebagai hak dan kewajiban dari seorang muslim.

Buku dengan judul *Demokrasi di Negara-Negara Muslim (Problem dan Prospek)* karya John L. Esposito & John O. Voll lebih banyak berbicara dan memperlihatkan tentang beragamnya pengalaman dan eksperimen kaum muslim dalam berdemokrasi. Keduanya menggunakan enam studi kasus antara lain Aljazair, Mesir, Iran, Malaysia, Pakistan dan Sudan. Dari Iran dan Sudan diperoleh contoh sistem politik yang ditegakkan oleh kelompok Islam revolusioner-militan. Di Pakistan dan Malaysia muncul jenis gerakan baru yang ikut ambil bagian dalam proses politik di kedua negara tersebut. Ko-eksistensi antara aktivisme Islam moderat dan ekstremis di Mesir dan Aljazair memperlihatkan tantangan kompleks yang menghadang kelompok elit penguasa. Selain ilustrasi diatas, keduanya tidak menafikan pembahasan tentang hubungan Islam dan politik dalam perspektif warisan sejarah serta persoalan negara dan oposisi dalam sejarah Islam.

Buku karya Eep Saefulloh Fatah dengan judul *Membangun Oposisi (Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan)*, lebih menekankan pembahasan kritis pada upaya tumbuhnya gerakan oposisi dalam konteks Indonesia. Satu hal yang menarik dari buku tersebut adalah Bangunan teoritiknya yang berangkat dari paradigma universal (Islam). Hal ini bisa dilihat pada bagian prolognya dengan mengutip hadits nabi Muhammad SAW ; Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kata-kata yang benar kepada penguasa yang dzalim.

Sebagai bahan telaah pustaka buku-buku yang disebutkan di atas sangat membantu penyusun untuk penelitian tentang oposisi politik Islam, disamping

beberapa kitab primer yang disusun oleh beberapa pemikir politik klasik, pertengahan dan modern.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana dimaklumi, Islam adalah agama universal dan komprehensif yang meliputi seluruh segmen kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, lingkungan dan sebagainya. Sudah menjadi keyakinan banyak orang (*peneliti atau pengkaji*), bahwa al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran Islam memuat prinsip-prinsip global yang mengatur seluruh segmen kehidupan diatas. Dalam kaitannya dengan persoalan sosial-politik, secara keseluruhan wacana Islam memerintah dan mengajak umat Islam untuk melakukan oposisi sebagai kontrol kepada pemerintah agar tetap menjaga amanat umat serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tujuan bernegara dapat terealisasi dengan baik¹⁰.

Hal tersebut bisa dicermati dalam al-Qur'an yang memuat perintah maha penting yang dibebankan kepada seluruh umat manusia untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Al-Qur'an menegaskan sebagai berikut:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
واولئك هم المفلحون¹¹

¹⁰) Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Isu-Isu Besar Politik Islam* (Bandung: Mizan; 1996), Cet.1, hlm.132.

¹¹) Ali Imran (3) : 104.

Dalam sebuah Hadis, Nabi pernah menyatakan sebagai berikut:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فليسا نه، فان لم يستطع
فبقلبه، وهو اضعف الإيمان¹²

Karena merupakan beban tugas dengan segala tuntutan, maka setiap muslim harus menolak setiap ketidakberesan atau kesalahan yang ada dihadapannya baik dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atau bahkan oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan sikap penolakan terhadap ketidakberesan dan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah atau memberikan masukan-masukan untuk kebaikan bersama yang disampaikan umat, dalam istilah ilmu politik disebut sebagai kelompok oposisi. Secara paradigmatis dengan mengacu kepada kerangka dasar atau pijakan terhadap kedua teks diatas kehadirannya dalam sebuah sistem politik menjadi suatu hal yang niscaya. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis watak pemerintahan selalu cenderung melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam praktek politiknya.

Kerangka teoritis diatas setidaknya mampu mengcover persoalan-persoalan yang berkaitan dengan oposisi dalam sistem politik Islam.

¹²⁾ An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah), VIII:112.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) karena sumber datanya berupa buku-buku, kitab-kitab yang memuat pemikiran kedua tokoh diatas baik yang ditulis oleh keduanya sebagai bahan primer atau karya-karya ulama' lain yang berkaitan dengan tema diatas sebagai bahan sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif; dengan mendiskripsikan dan membandingkan pemikiran Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah tentang hal-hal penting yang berhubungan dengan praktek oposisi dalam politik Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka maka konsekwensinya adalah mencari atau menelaah serta mengapresiasi kitab-kitab, buku-buku serta tulisan –tulisan lain yang terkait dengan pokok bahasan, lalu dianalisis.

4. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Metode induktif berangkat dari data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif berangkat dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode komparatif adalah membandingkan kedua

pemikiran tokoh diatas, dengan disertai analisa kritis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya.

5. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan historis sosiologis yaitu dengan mencoba menarik wacana oposisi keakar sejarahnya dan menguraikannya, disertai dengan melihat pengaruh sosio kultural yang membentuk bangunan berfikir kedua tokoh di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan dan menguraikan pembahasan dalam pokok bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas tentang selang pandang oposisi politik Islam yang berisi pengertian oposisi politik Islam, sejarah timbulnya oposisi politik Islam dan landasan normatif tentang kaidah dan jaminan beroposisi.

Bab ketiga, akan mengetengahkan biografi Abu Ya'la al-farra' dan Ibnu Taimiyah dan Zamannya, yang meliputi latar belakang keluarga, pendidikan serta pemikiran dan karya-karyanya. Selanjutnya biografi Ibnu Taimiyah yang meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, pemikiran dan karya-karyanya.

Bab keempat, akan menganalisa kedua pemikiran tokoh diatas, dengan membandingkan dan mengkritisi pemikirannya khususnya tentang oposisi politik Islam.

Bab kelima, yang merupakan penutup dari rangkaian penelitian ini memuat kesimpulan akhir dari persoalan dasar penelitian ini dan juga disertai saran-saran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan oposisi politik Islam adalah suatu sikap atau gerakan penentangan atau ketidaksetujuan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat Islam (baca: muslim) terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap melenceng dari ajaran-ajaran Islam, atau sikap partisipasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dengan senantiasa kritis dan mengontrol agar supaya kebijakan-kebijakan yang diambil tidak melenceng dari ajaran-ajaran Islam sehingga cita-cita politik Islam bisa tercapai yaitu tegaknya ajaran-ajaran Islam dan terciptanya harmoni sosial dan masyarakat yang berkeadilan. Gerakan oposisi politik Islam bisa hadir dalam dua bentuk. Pertama, oposisi partisipatif yaitu dengan berpartisipasi secara kritis dan mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah agar tidak melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Kedua, oposisi revolusioner yaitu dengan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, jika ia sudah benar-benar melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Oposisi revolusioner ini bisa dilakukan jika oposisi partisipatif sudah tidak berfungsi lagi,

situasi dan kondisi pemerintah atau pemimpinnya sudah sangat parah dan harmoni sosial dalam masyarakat tidak tercipta.

2. Dalam pandangan Abu Ya'la al-Farra', gerakan oposisi partisipatif yang berbentuk kerjasama dan kontrol kepada pemerintah boleh dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga agar pemerintah atau pemimpin konsisten menjalankan amanah dan kewajibannya sehingga tujuan dan cita-cita politik Islam bisa tercapai. Demikian juga Ibnu Taimiyah mempunyai pandangan yang sama tentang gerakan oposisi partisipatif ini. Sedangkan dalam konteks oposisi revolusioner keduanya memiliki pemikiran yang berbeda. al-Farra' lebih cenderung mengatakan bahwa gerakan oposisi revolusioner terhadap pemerintah tidak dapat dibenarkan sama sekali, baik yang sifatnya hanya membangun suatu aliran mazhab baru atau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Menurutny kelompok masyarakat yang melakukan hal tersebut dapat dikenai sanksi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa melakukan oposisi revolusioner terhadap pemerintah dapat dibenarkan apabila seorang pemimpin sudah melenceng dan keluar dari ajaran Islam. Ibnu Taimiyah bahkan mengisyaratkan diperkenankannya melakukan oposisi dengan pemberontakan fisik jika seorang pemimpin sudah benar-benar meninggalkan ajaran Islam terutama shalat. Bahkan melakukan oposisi

revolusioner terhadap pemimpin yang demikian itu sudah menjadi kewajiban masyarakat. Walaupun demikian menurutnya melakukan gerakan oposisi revolusioner adalah merupakan alternatif terakhir, karena pertimbangan akibat yang ditimbulkannya. Barangkali pada saat yang bersamaan penulis seakan membaca pemikiran yang paradoks antara teori dan sikap yang dipraktekkan oleh Ibnu Taimiyah.

B. S a r a n

Wacana oposisi adalah merupakan bagian penting dari sistem politik Islam. Oleh sebab itu melakukan kajian yang komprehensif terhadap masalah ini menjadi demikian penting. Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh para pemerhati pemikiran politik Islam sehingga pemahaman kita terhadap wacana ini menjadi lebih sempurna.

Mudah-mudahan pemikiran dari kedua tokoh diatas dapat lebih memperkaya khazanah pemikiran politik Islam. Harapan yang lebih dalam tentunya adalah mudah-mudahan spirit kegelisahannya berimbas kepada kita semua. Semoga. *Wallahu A'lamu bi al-Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Al-Hadis

Bukhari, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Islāmi li at-Ṭaba'ah wa an-Naṣr, tt.

Hambal, Imam Ahmad Ibnu, *Musnad Ahmad*, 5 jilid, Beirut: Al-Maktabah al-Islam Dar al-shawar at-Taba'ah wa an-nashr, tt.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, ttp: Syirkah Maktabah Ahmad bin Nubhan wa auladuhu, tt.

Tarikh, Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdelwahab el-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, Kritik Teori Politik Islam, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Abdul Hafidz, Adil Fathi Šabit, *Syar'iyyah as-Sulṭah fī al-Islām*, Dirāsah Muqāranah, Iskandariyah: Dār al-Jāmi'ah al-Jadīdah li al-Nasyr, 1996.

Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan 1995.

Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam, Bandung: Mizan, 1993.

Abu Zahrah, Muhammad, Imam, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah fī as-Siyāsah wa al-Aqā'id wa Tarikh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, Jeddah: Li at-Ṭabā'ah wa an-Nasyr wa at-Taūzī' Al-Haramain, 2 juz.

Ahmad Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Al-Farra', Abu Ya'la, *Al-Aḥkām as-Sulṭānīyah*, ttp, Beirut, Dār al-Fikr, 1963.
- Ali as-Salus, *Imamah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar'i*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anders Uhlin, Oposisi Berserak, *Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indoncsia*, Bandung, Mizan, 1998.
- Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 1999.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta, Ull Press, 2000.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Dale. F. Eickelman & James Piscetori, *Politik Muslim, Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Din Syamsuddin, "Antara Yang Berkuasa dan Yang Dikuasai, Refleksi Atas Pemikiran dan Praktek Politik Muslim", *Al-Jami'ah, Journal Of Islamic Studies*, No.1, Vol.39, 2001, hlm.151.
- Dhiauddin Rais, *Islam dan Khilafah, Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam Ali Abdur Raziq*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Eep Saefullah Fatah, *Membangun Oposisi, Agenda-agenda Perubahan Politik Masa Depan*, Bandung, Rosda, 1999.
- Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Isu-Isu Besar Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1996.
- Fajri, Rahmat, "Kajian Historis Pemikiran Teologi Ibnu Taimiyah", *Esensia, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, No. 2, Vol. 1, 2000, hlm. 196.
- Ghazali, Imam al, *Nasehat Bagi Penguasa*, alih bahasa. Ahmadi Thoha, Bandung, Mizan, 1994.
- Hafizh Dasuki dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid I-V 1994.

- Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Husain Haikal, *Muhammad, Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa, Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992.
- Ibnu Kasir, Muhammad Ibnu Ismail, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt, Jilid IX, Juz XIV.
- Jabir Qumaihah, *Berposisi Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990
- John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim, Problem dan Prospek*, Bandung: Mizan, 1999.
- Juhaya S. Praja, "Epistemologi Ibnu Taimiyah", *Ulumul Qur'an, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban*, No. 7, Vol. II, 1990, hlm. 74.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Tecori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan 1997.
- Mac Iver, *Negara Modern*, alih bahasa, Moertono, Jakarta: Aksara Baru 1984.
- Madjid, Nurcholish, *Cendekiawan & Relegiusitas Masyarakat (Kolom-Kolom di Tabloid Tekad)*, Jakarta: Tabloid Tekad & Paramadina, 1999.
- Mamduh, Ali Muhammad al-Arabi, *Al-Akhlaq wa as-Siyāsah fi al-Fikr al-Islāmi wa al-Librali wa al-Mariksi*, Mesir: Maṭabi' al-Hai'ah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab, 1992.
- Maududi, Abu A'la al, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa. Asep Hikmat, Bandung, Mizan, 1994.
- Mawardi, Abi Hasan al, *Al-Ahkām as-Sulṭānīyah*, ttp. Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi wa Auladuh, 1973.
- Mesudul Hasan, *Recontruction of Political Thought in Islam*, Pakistan: Islamic Publications (PUT) Limited, 1988.
- Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Bandung: Pustaka, 1995.

-----, *Tentang Teori Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 1987.

Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, jilid 1, II dan III. 2000.

Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah as-Syar'iyah fi Islāhi ar-Rā'i wa ar-Rā'iyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1960.

Usman Ismail, Asep, "Masalah al-Walayah dalam Tasawuf: Pandangan Hakim at-Tirmizi dan Ibnu Taimiyah", Paramadina, Jurnal Pemikiran Islam, No.2, Vol.1, 1999, hlm. 120.

Widodo. L. Amin, *Fiqh Siyasah, Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Tiara Wacana 1994.

Yusuf Ibis, al-Imamah Inda al-Sunnah, *Nusūṣ al-Fikr as-Siyāsi al-Islāmi*, Bairut: Dār al-Tali'ah, 1996.

Zaenuddin, HM. *Prospek Gerakan Oposisi Dalam Era Pemerintahan Gus Dur-Megawati*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Kamus

Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, Lebanon: Beirut, 1986.

B.N. Marbun, SH. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

John. M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif), 1984.

No	Hal	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	10	10	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.
2	11	11	Siapa diantara kalian yang melihat kemunkaran hendaklah merubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, ia adalah lemah-lemah iman.
			BAB II
3	35	30	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan dilautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
4	36	31	Dan sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Dan Aku adalah Tuhan-mu. Karena itu bertakwalah kepadaku.
5	36	32	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
6	36	33	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
7	38	36	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
8	38	37	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
9	38	38	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
			BAB III
10	45	15	Akan terjadi fitnah, jika tidak terdapat seorang pemimpin yang mengurus urusan manusia.
11	54	10	Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu supaya menunaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerima, dan bila kamu menjatuhkan hukum antara sesama manusia maka hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi kamu peringatan dengan itu (adil): bahwa sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taati pulalah rasul dan pemimpinmu, maka jika sekiranya kamu bersengketa dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yakni sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian itu adalah cara yang paling baik dan sebaik-baik jalan.
12	54	10	Barang siapa yang bertugas mengatur urusan kaum muslimin, maka diangkatnya seseorang padahal ia masih melihat orang yang lebih patut untuk kepentingan umat Islam dari yang diangkatnya itu, maka dengan begitu sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.
			BAB IV
13	63	6	Darah seorang muslim menjadi halal dalam tiga perkara, 1. Kafir setelah beriman. 2. Melakukan zina muhsan. 3. Membunuh manusia secara tidak manusiawi.

BIOGRAFI ULAMA

1. FAHMI HUWAYDI

Ia adalah seorang pemikir dan kolomnis Mesir. Banyak menulis dan mengkompresikan gagasan-gagasannya dalam media berbahasa Arab, seperti *Al-Aḥrām*, *Al-‘Arabī* dan *Al-Majallah*. Bukunya yang terkenal antara lain *Al-Wa’y Al-Islami*, *Muwatinun la Zimmiyun* dan *Al-Islām wa Ad-Dimuqrāṭiyyah*.

2. AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, lahir pada tahun 364 H/ 975M dan wafat pada tahun 450 H/ 1059 M. Ia adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirnya ia kembali dan menetap di Baghdad. Ia termasuk penulis yang produktif. Diantara karyanya yang terkenal adalah *Adab ad-Dunyā wa ad-dīn*, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyah* dan *Qawānīn al-Wuzārāh*, *Siyāsah al-Mālik*.

3. IMAM HAMBALI

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Ia adalah seorang mujtahid di bidang fiqh dan salah seorang di antara empat imam mazhab yang terkenal di dunia Islam. Setelah menjadi ulama besar yang mempunyai banyak pengikut, ia dikenal dengan panggilan Imam Hanbali dan mazhabnya disebut mazhab Hanbali. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Tafsīr Al-Qur’ān*, *Kitāb an-Nasīkh wa al-Mansūkh* dan *Kitāb at-Tarīkh*.

4. AL-GAZALI

Ia mempunyai nama lengkap Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali at-Tusi an-Naisaburi, lahir di Gazalah pada tahun 450 H/1058 M, sebuah kota kecil dekat Tus, Khurāsan. Masa kecilnya dimulai dengan belajar fiqh. Kemudian ia pergi ke Naisabur dan mengikuti pelajaran Imam al-Haramain. Pernah menjabat sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah, Baghdad. Pada tahun 489H, ia pergi ke Damaskus dan tinggal disana selama beberapa waktu. Kemudian ia pergi ke Bait al Maqdis dan menjalani hidup zuhud. Disamping seorang faqih, ia juga terkenal sebagai sufi, filosof dan teolog. Banyak karyanya, berbahasa Arab dan Persia. Diantara yang terkenal adalah *Ihyā’ Ulūm ad-dīn*, *Al-Munqiz min ad-Dalāl* dan *Al-Mustasyfa min Ilm al-Uṣūl*. Al-Gazali wafat pada tahun 505 H/1111 M.

CURICULUM VITAE

- Nama : H a r i s
- Tempat &Tgl Lahir : Sumenep, 17 Desember 1978
- Alamat : Jl. Telaga Permai no. 5 Telaga-Ganding-Sumenep-Jawa Timur 69462
- Orang Tua
- Ayah : H. Ali Imran
- Ibu : Hj. Maftuhah
- Pendidikan :
1. SDN. Rombiya Timur I (1990)
 2. MI. Raudlatus Shibyan (1990)
 3. Mts. I Annuqayah Sumenep (1993)
 4. MA. I Annuqayah Sumenep (1996)
 5. Masuk di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (1996)
- Pengalaman Organisasi :
1. Divisi Intelektual PMII Rayon Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997-1998)
 2. Litbang KSBH Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1997-1998)
 3. Litbang Fokep Kopma IAIN Sunan Kalijaga (1993-1999)
 4. Ketua Program Pengembangan Bahasa Arab Pendidikan Kader Masjid Syuhada (1998-2000)